

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**

Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Dalam
Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama



Disusun oleh :

NAMA : FITRIA MEGAWATI SULARNO

NPM : 0109U287

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA

Terakreditasi (*Accredited*)

SK. Ketua Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor: 014/BAN-PT/AK-XII/S1/VI/2009

Tanggal 12 Juni 2009

BANDUNG

2013

ABSTRAK

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi dan Studi Kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis menggunakan program SPSS untuk menguji Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal baik secara parsial dengan uji T dan simultan dengan uji F. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan perangkat SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) Versi 19.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki t hitung sebesar 6,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai sig dibawah 0,05, sehingga variabel PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 2,963. Variabel PAD memiliki t hitung sebesar 2,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, dimana nilai sig dibawah 0,05, sehingga variabel PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,399. Variabel DAU memiliki t hitung sebesar 1,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0,055, dimana nilai sig diatas 0,05, sehingga variabel DAU tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,057.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan juga PDRB, PAD dan DAU diperoleh nilai F hitung sebesar 75,169 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, PDRB, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (**Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006**). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2002, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono (**Sidik, et al 2002**), tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan "riil" yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan

penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Fenomena yang ada bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak ada peranan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah, sehingga DAU menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat,

kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki

sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda (**Prakosa, 2004**).

Namun, pada praktiknya, transfer dari Pempus merupakan sumber pendanaan utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (**Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002**).

Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyatannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (**Key 1940 dalam Fozzard, 2001**). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi

melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal. Kedua, pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitannya dengan pembangunan daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi dan sebagai salah

satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2. Bagi pemerintah pusat dan daerah

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai pengembangan atas peningkatan PAD, sehingga di masa mendatang daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil kekayaan daerah masing-masing. Diharapkan konsep desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya. Pemerintah daerah tidak menggantungkan diri kepada pemerintah pusat terus menerus paling tidak dapat di minimalisirkan sehingga semakin mandiri.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini juga bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dimana data diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjrn Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah : (www.djpk.depkeu.go.id). Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variable Penelitian

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Menurut **Indra Bastian (2001)** Akuntansi Pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan **Kustadi Arinta (1996)** menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan Negara (*public finance*). Dalam hal ini khususnya tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*) termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

2.1.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit.

Menurut **Bastian (2003)** dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapat:

- 1) Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban

kepada masyarakat, di Indonesia akuntansi pemerintahan mencakup beberapa bidang utama yakni:

- (1) Akuntansi pemerintah pusat
 - (2) Akuntansi pemerintah daerah
 - (3) Akuntansi Parpol dan LSM
 - (4) Akuntansi yayasan
 - (5) Akuntansi pendidikan dan kesehatan (puskesmas, rumah sakit dan sekolah)
 - (6) Akuntansi tempat peribadatan (Mesjid, Gereja, Wihara, Kuil)
- 2) Aktifitas yang mendekati diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke swasta.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Menurut **Saragih (2003)** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.”

Menurut **Halim (2004)** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.”

Dari beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *output* yang ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan Belanja Modal.

2.1.2.1 Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.”

Sedangkan menurut **Halim (2004)** terkait dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal yaitu:

“Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.”

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Anggaran pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- 2) Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- 3) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.2.2 Fungsi APBD

Fungsi APBD pada dasarnya sama dengan fungsi APBN. Dalam artikel yang peneliti baca (http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_Belanja_Daerah) disebutkan bahwa fungsi APBD terdiri dari:

- “1) Fungsi otorisasi
- 2) Fungsi perencanaan
- 3) Fungsi pengawasan
- 4) Fungsi alokasi
- 5) Fungsi distribusi
- 6) Fungsi stabilitas”

Penjelasan dari fungsi APBD di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- 5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 6) Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut **Boediono (1985)** pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Dari artikel yang peneliti baca

[\(http://infostatntb.wordpress.com/pengertian-pdrb-2/metode-perhitungan-pdrb/\)](http://infostatntb.wordpress.com/pengertian-pdrb-2/metode-perhitungan-pdrb/)

terdapat tiga pendekatan umum yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

- “1) Pendekatan Produksi
- 2) Pendekatan Pendapatan
- 3) Pendekatan Pengeluaran”

Penjelasan dari ketiga pendekatan umum diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya. Pendekatan ini bisa juga disebut pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam proses produksi dari input antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.
- 2) Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor pemerintahan.
- 3) Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada pengguna akhir barang dan jasa di wilayah domestik. Jadi Produk Domestik Regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang dan metode penjualan eceran.
 - b) Metode pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran

belanja, metode *balance sheet* dan metode statistic perdagangan luar negeri. Pada prinsipnya cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah satu-satunya sasaran di Negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

2.1.3.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan belanja Modal

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan aekonomi daerah.

2.1.4 Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005, Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, dalam operasionalisasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009, belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, disamping pengeluaran pembiayaan daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah,

satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Klasifikasi Belanja daerah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya material. Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam Peraturan Kepala daerah. Berikut jenis-jenis belanja diantaranya:

- 1) Belanja Operasi
Belanja Operasi terdiri dari:
 - (1) Belanja Pegawai
 - (2) Belanja Barang
 - (3) Belanja Bunga
 - (4) Belanja Subsidi
 - (5) Belanja Hibah
 - (6) Belanja Bantuan Sosial
 - (7) Belanja Bantuan Keuangan
- 2) Belanja Modal
 - (1) Belanja Tanah
 - (2) Belanja Peralatan dan Mesin
 - (3) Belanja Gedung dan Bangunan
 - (4) Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan
 - (5) Belanja Aset Tetap Lainnya
- 3) Belanja Tak terduga

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut **Halim (2004)** tentang pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Sedangkan menurut **Mardiasmo (2002)** tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.”

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah:

“Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Menurut **H. Mohammad Zain (2010)** mengemukakan bahwa pajak daerah adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

(1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkotaan atau perkantoran.

(2) Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

(3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

(4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

(6) Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahan galian golongan c terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, tanah liat dan lain-lain.

(7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2) **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

4) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.1.5.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa:

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah (Saragih, 2003).

Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003). Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2003).

2.1.6.1 Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

1) Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

2) Tahapan Administratif

Tahapan ini Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3) Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4) Tahapan Politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panitia kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

2.1.6.2 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

2.1.7 Belanja Modal

Menurut **Halim (2004)** tentang pengertian Belanja Modal, yaitu:

“Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1):

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

- “1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- 2) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.”

Dari artikel yang penelitian baca (<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>) Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama:

- “1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Belanja Modal Fisik Lainnya”

Penjelasan dari 5 kategori Belanja Modal diatas adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam

kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Berikut ini adalah table komponen biaya yang termasuk dalam belanja modal:

Table 2.1
Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya

| Jenis Belanja Modal | Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal |
|-----------------------------------|--|
| Belanja Modal Tanah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4) Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah 5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin |

| | |
|---|---|
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5) Belanja Modal Perizinan jalan dan Jembatan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan Jembatan 8) Belanja Modal bahan baku Irigasi dan Jaringan 9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan 10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan 11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 13) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan 14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan Jaringan |
| Belanja Modal Fisik Lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya 5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6) Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya |

2.2 Kerangka Pemikiran

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan yang paling mendasar dalam penganggaran sektor publik.

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagaimana

tujuan otonomi daerah, diharapkan terciptanya kemandirian daerah yang ditandai dengan peningkatan PAD, maka diharapkan dana yang berasal dari pemerintah itu yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mendorong peningkatan investasi dalam belanja daerah yang bisa berdampak pada peningkatan layanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi publik.

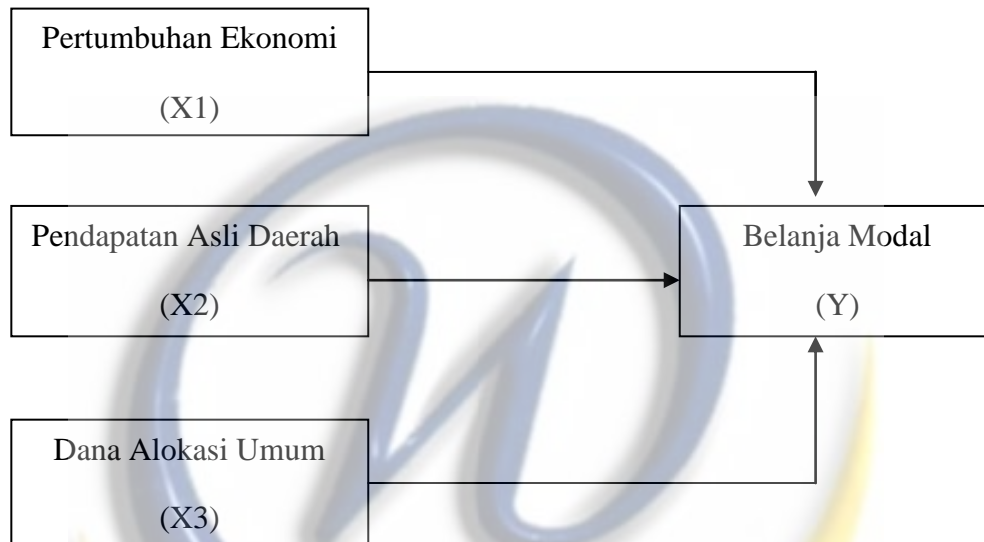
Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan , yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (**Samuels, 2002**).

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (**Kuncoro, 2004**). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi

memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. **Oates (1995), Lin & Liu (2000)** yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (**Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004**).

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi:

“Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.”

Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa:

“Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social.”

Tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (**Smith dan Bertozzi, 1998**). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara **Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002**, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawasan bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya **Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; von Furstenberg et al, 1986**). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis* (**Aziz et al, 2000; Doi, 1998; von Furstenberg et al, 1986**). Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan

perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (**Mardiasmo, 2002**). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Studi **Abdullah (2004)** menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. **Abdullah (2004)** menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan

desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

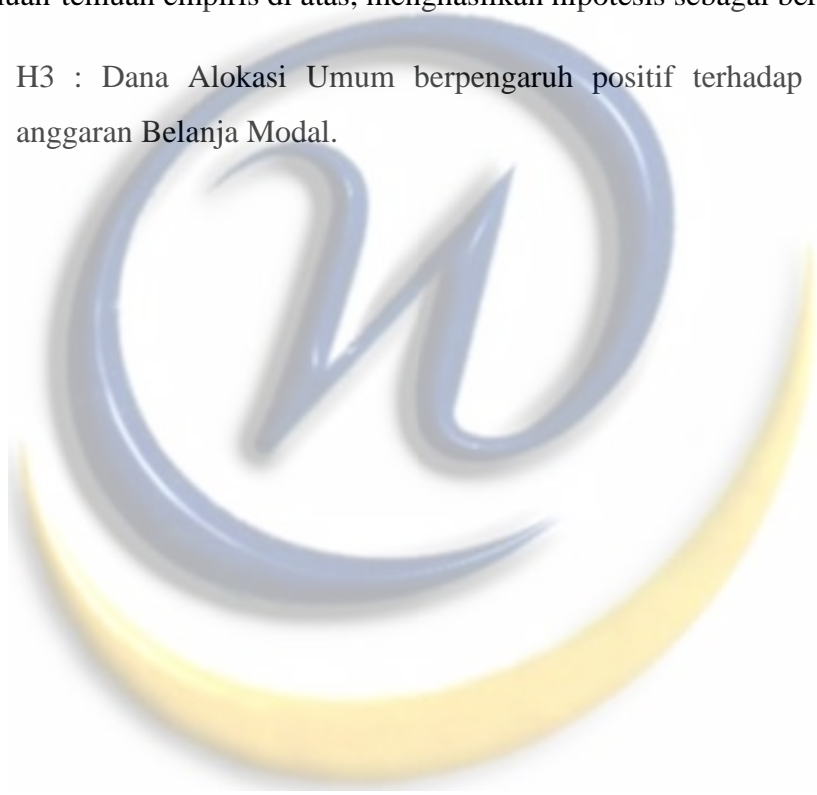
Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh **Holtz-Eakin et. al. (1985)** menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut pendapat **Suharsimi (2002)** Objek Penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penulisan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap efektivitas pengalokasian anggaran belanja modal.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya ditujukan untuk orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (**Sugiyono, 2004**). Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pengertian populasi tersebut yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2011.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi. Kesimpulan yang ditarik dari sampel akan mampu diberlakukan untuk keseluruhan populasi (**Sugiyono, 2004**).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Menurut **Sugiyono (2004:)**, “Teknik *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”, dimana teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* atau pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan pengertian sampel tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2007-2011 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2007-2011. Dari populasi yang berjumlah 26 (17 Kabupaten dan 9 Kotamadya), peneliti hanya meneliti sampel sebanyak 23 (15 Kabupaten dan 8 Kotamadya) yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kabupaten dan Kotamadya Provinsi Jawa Barat.
2. Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran yang lengkap minimal 5 tahun (2007-2011).
3. Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lengkap minimal 5 tahun (2007-2011).
4. Kabupaten dan Kotamadya yang mengalami peningkatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) minimal 5 tahun (2007-2011).
5. Kabupaten dan Kotamadya yang laporan keuangannya telah diaudit.

Berdasarkan kelima kriteria diatas, maka jumlah Kabupaten dan Kota yang akan dijadikan sampel penelitian sebanyak 23 (15 Kabupaten dan 8 Kota), dengan rincian sebagai berikut :

Table 3.1
Sampel Penelitian

| No | Nama Kabupaten | No | Nama Kota |
|----|------------------|----|------------------|
| 1 | Kab. Bandung | 1 | Kota Bandung |
| 2 | Kab. Sukabumi | 2 | Kota Sukabumi |
| 3 | Kab. Cianjur | 3 | Kota Bogor |
| 4 | Kab. Garut | 4 | Kota Cirebon |
| 5 | Kab. Tasikmalaya | 5 | Kota Bekasi |
| 6 | Kab. Ciamis | 6 | Kota Depok |
| 7 | Kab. Kuningan | 7 | Kota Cimahi |
| 8 | Kab. Cirebon | 8 | Kota Tasikmalaya |
| 9 | Kab. Majalengka | | |
| 10 | Kab. Sumedang | | |
| 11 | Kab. Indramayu | | |
| 12 | Kab. Subang | | |
| 13 | Kab. Purwakarta | | |
| 14 | Kab. Karawang | | |
| 15 | Kab. Bekasi | | |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2013)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Pengumpulan data skunder

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Menurut **Moh. Nazir (2003)** data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut yakni data runtut waktu (*time series*) berupa APBD kabupaten/kota se-Jawa Barat periode 2007-2011. Data diperoleh dari

media internet melalui situs www.djpk.depkeu.go.id , situs resmi pemda yang menerbitkan data APBD dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

2) Metode penelitian deskriptif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut **Moh. Nazir (2003)** metode Deskriptif adalah sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

3) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan baik secara *Library Research* maupun *Internet Research*, untuk memperoleh data dan menambah wawasan teoritis yang akan digunakan untuk kepentingan peneliti dengan maksud untuk memperoleh data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data sekunder yang diperoleh serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut **Sugiyono (2004)** Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Variabel-variabel ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dimana data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan landasan teoritis yang diperoleh dari literature dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sedangkan menurut **Sugiyono (2004)** variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang merupakan suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya:

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

2) Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen (*Dependent variable*) merupakan variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Pengertian mengenai Belanja Modal telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Table 3.2
Variabel Independen

| Variabel | Indikator | Skala Pengukuran | Instrumen Penelitian |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) | 1. PDRB Harga Berlaku | Rasio | Laporan Hasil Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat |

| | | | |
|---|--|-------|--------------|
| 2. Pendapatan Asli Daerah (X ₂) | 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rasio | Laporan APBD |
| 3. Dana Alokasi Umum (X ₃) | 1. Dana transfer umum | Rasio | Laporan APBD |

Table 3.3
Variabel Dependen

| Variabel | Indikator | Skala Pengukuran | Instrumen Penelitian |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Belanja Modal (Y) | 1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya | Rasio | Laporan APBD |

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis

Setelah data yang akan diteliti sudah terkumpul, maka dilakukanlah analisis data. Analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran jawaban atas variabel-variabel yang diteliti dari data yang sudah terkumpul terkait dengan rumusan dan hipotesis yang diajukan. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2004).

3.5.1.1 Uji Asumsi Klasik

Hasan (2005) menyatakan “dalam penggunaan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang dapat menghasilkan estimator yang tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil”. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat dikatakan mendekati atau sama dengan kenyataan dan juga lebih akurat. Asumsi tersebut dikenal dengan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Pengujian asumsi ini untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas berkorelasi dengan sempurna maka disebut multikolinieritasnya sempurna (*perfect multicollinearity*), yang berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak dapat digunakan. Indikator untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah menguji asumsi tersebut dengan uji korelasi antar variabel independen dengan matriks korelasi.

Menurut **Ghozali (2006)**, bahwa ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas apabila nilai VIF > 1.0 dan nilai toleransi < 1.0 . **Nugroho (2005)** membatasi nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi tidak kurang dari 0.1.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan. Autokorelasi berarti terdapat korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu datum dipengaruhi oleh datum sebelumnya (**Hasan. 2005**). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (**Singgih Santoso, 2000**). Terdapat beberapa cara untuk menghitung autokorelasi dalam regresi antara lain metode grafik dan uji *Durbin-Watson*. Rumus yang digunakan dalam uji autokorelasi ini adalah sebagai berikut :

Ghozali (2003) mendeteksi autokorelasi dengan indicator sebagai berikut :

- a) Jika nilai DW hitung $>$ batas atas (du) tabel, berarti terdapat autokorelasi.
- b) Jika nilai DW hitung $<$ batas atas (du) tabel, berarti terdapat autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan uji asumsi klasik ini adalah adanya gejala heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi dari adanya gejala heteroskedastis adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar maupun kecil walaupun penaksir diperoleh menggambarkan populasinya dalam arti tidak bias.

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastis dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastis.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastis.

3.5.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (**Sugiyono, 2004**).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Untuk mempermudah melakukan perhitungan secara statistik, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan *software* SPSS 19.0. Berikut ini merupakan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{PDRB} + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

PDRB = Pendapatan Asli Daerah (PDRB)

e = *error*

3.5.1.3 Penetapan Tingkat Signifikansi (α)

Tingkat signifikan (*significant level*) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%.

3.5.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal kemudian dapat diketahui dengan menggunakan rumus koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam % yang

diperoleh dari bentuk kuadrat koefisien korelasi yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Dalam mencari nilai koefisien determinasi rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Dimana : KP = Nilai Koefisien Penentu

R = Nilai Koefisien Korelasi

Nilai Kd tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan satu. Dengan demikian berlakulah rumus $0 \leq Kd \leq 1$. Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam % sehingga hasilnya perlu dikalikan 100%.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi digunakan untuk menguji apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak.

3.5.1.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan pada rumusan masalah, maka dilakukan pengujian hipotesis. Karena hipotesis yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari empat hipotesis, maka pengujian hipotesisnya juga terdiri dari empat. Tiga hipotesis di uji secara parsial dan satu hipotesis di uji secara bersama-sama atau simultan.

1) Pengujian Hipotesis parsial (Uji t)

Uji t (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel

dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis secara parsial peneliti menggunakan bantuan *software SPSS 19.0*.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh.

Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_{01} : \beta_1 \leq 0$, Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

$H_{a1} : \beta_1 > 0$, Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

$H_{02} : \beta_2 \leq 0$, Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

$H_{a2} : \beta_2 > 0$, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

$H_{03} : \beta_3 \leq 0$, Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

$H_{a3} : \beta_3 > 0$, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 ditolak jika $sig. t < 0,05$

H_0 diterima jika $sig. t > 0,05$

2) Pengujian Secara Simultan (Uji f)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis secara simultan tersebut peneliti menggunakan bantuan *software SPSS 19.0*.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dimana hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Adapun hipotesisnya sebagai berikut :

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap variabel dependen yaitu anggaran Belanja Modal (Y).

$H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap variabel dependen yaitu anggaran Belanja Modal (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 ditolak jika $Sig. F < 0,05$

H_0 diterima jika $Sig. F > 0,05$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini telah dilakukan oleh penulis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2011 sebagai berikut:

4.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Berikut ini output SPSS yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Table 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|------------------------|--------|----------------|-----|
| Belanja Modal | 2E+008 | 120170561,3 | 115 |
| Dana Alokasi Umum | 7E+008 | 236060079,1 | 115 |
| Pendapatan Asli Daerah | 1E+008 | 79991059,26 | 115 |
| PDRB Harga Berlaku | 2E+007 | 22116029,37 | 115 |

Sumber : Diolah dari SPSS 19, 2013

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan.

Berikut adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011 :

Tabel 4.2
PDRB per Kapita
(Rupiah)

| No. | Nama Daerah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kab. Bandung | 33.319.630,76 | 38.282.169 | 41.262.099 | 46.092.239 | 51.291.763 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 14.502.885,80 | 16.133.203 | 17.264.686 | 18.595.077 | 20.160.894 |
| 3 | Kab. Cianjur | 13.807.923,13 | 15.496.974 | 16.737.740 | 18.435.750 | 20.573.047 |
| 4 | Kab. Garut | 17.715.223,88 | 20.360.837 | 22.271.424 | 24.844.613 | 27.491.630 |
| 5 | Kab. Tasikmalaya | 9.353.880,69 | 10.474.020 | 11.914.003 | 12.771.907 | 13.931.810 |
| 6 | Kab. Ciamis | 12.615.588,97 | 14.501.906 | 15.841.183 | 17.572.448 | 19.344.956 |
| 7 | Kab. Kuningan | 6.094.979,05 | 7.047.927 | 8.179.328 | 9.131.570 | 10.018.855 |
| 8 | Kab. Cirebon | 12.927.156,71 | 15.564.718 | 17.118.740 | 19.170.306 | 20.982.832 |
| 9 | Kab. Majalengka | 7.250.596,85 | 8.297.703 | 8.994.427 | 10.157.419 | 10.994.066 |
| 10 | Kab. Sumedang | 9.034.570,57 | 10.300.942 | 11.188.168 | 12.265.684 | 13.531.778 |

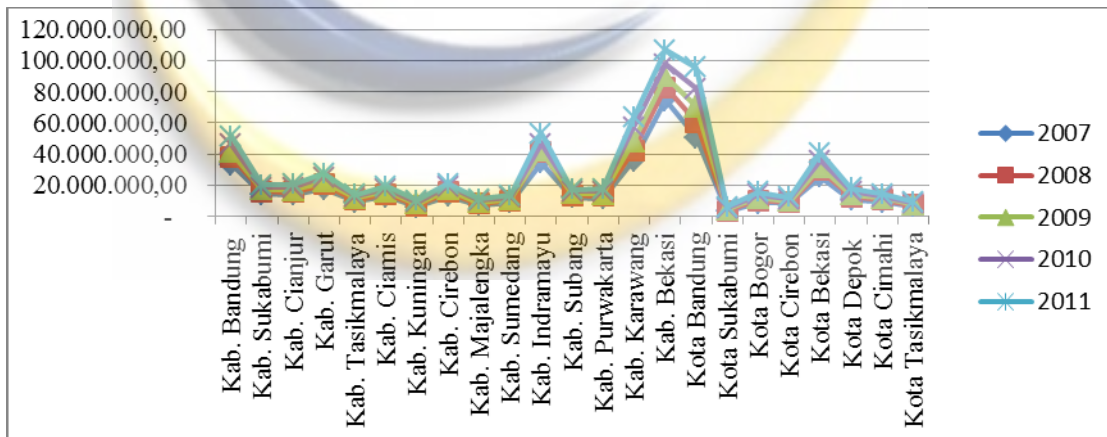
| | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 | Kab. Indramayu | 34.541.953,08 | 41.528.321 | 41.956.488 | 46.409.619 | 53.044.751 |
| 12 | Kab. Subang | 12.124.641,00 | 13.541.816 | 14.767.393 | 15.894.711 | 17.120.524 |
| 13 | Kab. Purwakarta | 11.271.570,60 | 13.215.853 | 14.156.385 | 15.957.021 | 17.495.516 |
| 14 | Kab. Karawang | 35.970.209,03 | 42.445.653 | 48.283.356 | 57.260.099 | 63.617.115 |
| 15 | Kab. Bekasi | 74.498.000,40 | 82.977.554 | 89.735.793 | 97.526.722 | 106.773.286 |
| 16 | Kota Bandung | 50.552.181,99 | 60.444.487 | 70.281.163 | 82.002.176 | 95.612.863 |
| 17 | Kota Sukabumi | 3.172.970,91 | 3.697.957 | 4.394.807 | 5.175.324 | 5.921.024 |
| 18 | Kota Bogor | 8.558.035,70 | 10.089.944 | 11.904.600 | 13.908.900 | 15.487.434 |
| 19 | Kota Cirebon | 9.149.434,86 | 8.933.934 | 9.877.195 | 10.931.430 | 12.117.055 |
| 20 | Kota Bekasi | 25.419.184,82 | 29.525.360 | 31.475.388 | 35.679.065 | 40.528.808 |
| 21 | Kota Depok | 10.599.147,15 | 12.542.499 | 14.063.916 | 16.144.726 | 17.913.313 |
| 22 | Kota Cimahi | 9.304.794,67 | 10.716.291 | 11.683.705 | 12.845.602 | 14.164.831 |
| 23 | Kota Tasikmalaya | 6.353.910,75 | 7.150.922 | 7.769.682 | 8.469.036 | 9.274.755 |
| Total | | 428.138.471,37 | 493.270.990,00 | 541.121.669,00 | 607.241.444,00 | 677.392.906,00 |
| Maksimum | | 74.498.000,40 | 82.977.554,00 | 89.735.793,00 | 97.526.722,00 | 106.773.286,00 |
| Minimum | | 3.172.970,91 | 3.697.957,00 | 4.394.807,00 | 5.175.324,00 | 5.921.024,00 |
| Rata- rata | | 18.614.716,15 | 21.446.564,78 | 23.527.029,09 | 26.401.801,91 | 29.451.865,48 |

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bekasi memperoleh Produk Domestik Regional Bruto per Kapita paling besar dengan jumlah Rp 74.498.000,40 sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 3.172.970,91 dan untuk rata-rata perolehan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 18.614.716,15. Pada tahun 2008 Kabupaten Bekasi kembali memperoleh Produk Domestik Regional Bruto per Kapita paling besar sebanyak Rp 82.977.554 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 3.697.957 dan untuk rata-rata perolehan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 21.446.564,78. Pada tahun 2009

Kabupaten Bekasi kembali memperoleh Produk Domestik Regional Bruto per Kapita paling besar sebanyak Rp 89.735.793 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 4.394.807 dan untuk rata-rata perolehan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 23.527.029,09. Pada tahun 2010 Kabupaten Bekasi kembali memperoleh Produk Domestik Regional Bruto per Kapita paling besar sebanyak Rp 97.526.722 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 5.175.324 dan untuk rata-rata perolehan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 26.401.801,91. Dan pada tahun 2011 Kabupaten Bekasi kembali memperoleh Produk Domestik Regional Bruto per Kapita paling besar sebanyak Rp 106.773.286 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 5.921.024 dan untuk rata-rata perolehan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 29.451.865,48.

Gambar 4.1
Kondisi Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per Kapita)
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
Periode 2007-2011



Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan perannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta.

Berikut adalah data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011 :

Tabel 4.3
Pendapatan Asli Daerah
(Rupiah)

| No. | Nama Daerah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Bandung | 152.894.229 | 132.310.000 | 152.549.656 | 198.650.518 | 183.948.347 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 67.594.364 | 73.960.603 | 80.616.079 | 98.439.617 | 115.879.976 |
| 3 | Kab. Cianjur | 69.388.786 | 66.675.209 | 93.628.876 | 114.305.536 | 119.626.935 |
| 4 | Kab. Garut | 76.880.011 | 84.068.694 | 102.702.673 | 108.914.764 | 117.966.483 |
| 5 | Kab. Tasikmalaya | 34.725.529 | 32.035.000 | 49.657.867 | 48.321.760 | 45.547.535 |
| 6 | Kab. Ciamis | 54.711.926 | 46.416.963 | 51.276.556 | 50.512.876 | 55.080.000 |
| 7 | Kab. Kuningan | 43.507.885 | 45.679.466 | 63.573.539 | 68.158.690 | 79.210.273 |
| 8 | Kab. Cirebon | 100.692.756 | 121.757.691 | 116.095.438 | 139.426.725 | 169.840.874 |
| 9 | Kab. Majalengka | 46.020.646 | 44.613.447 | 68.121.599 | 76.398.018 | 81.148.306 |
| 10 | Kab. Sumedang | 68.754.294 | 80.193.408 | 90.819.326 | 108.646.804 | 138.150.848 |
| 11 | Kab. Indramayu | 47.704.563 | 61.336.000 | 86.408.587 | 99.439.223 | 102.997.759 |

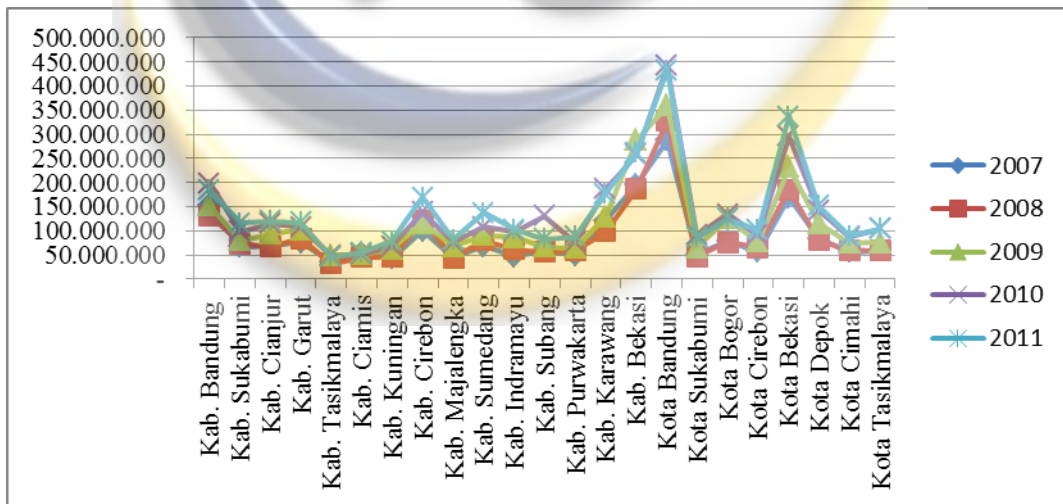
| | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Kab. Subang | 59.281.319 | 56.156.000 | 67.665.305 | 130.968.161 | 83.264.827 |
| 13 | Kab. Purwakarta | 50.324.496 | 59.386.627 | 64.044.768 | 76.489.287 | 87.697.946 |
| 14 | Kab. Karawang | 121.414.897 | 98.488.451 | 130.020.658 | 186.949.235 | 177.432.356 |
| 15 | Kab. Bekasi | 196.320.106 | 186.182.167 | 287.299.507 | 258.671.098 | 260.761.858 |
| 16 | Kota Bandung | 287.249.534 | 327.508.555 | 360.152.627 | 441.871.142 | 433.229.474 |
| 17 | Kota Sukabumi | 50.567.178 | 47.373.000 | 66.190.681 | 91.472.357 | 85.455.323 |
| 18 | Kota Bogor | 79.642.532 | 75.792.000 | 125.313.316 | 134.739.596 | 125.453.035 |
| 19 | Kota Cirebon | 57.002.329 | 66.221.948 | 77.318.390 | 90.795.675 | 101.194.687 |
| 20 | Kota Bekasi | 169.640.279 | 185.000.000 | 231.694.925 | 296.046.879 | 336.600.000 |
| 21 | Kota Depok | 84.437.984 | 80.425.378 | 115.720.348 | 142.380.789 | 152.096.144 |
| 22 | Kota Cimahi | 55.851.469 | 60.198.393 | 75.037.372 | 87.321.280 | 89.475.129 |
| 23 | Kota Tasikmalaya | 58.604.933 | 59.000.174 | 76.503.523 | 104.773.656 | 104.897.749 |
| Total | | 2.033.212.045 | 2.090.779.174 | 2.632.411.616 | 3.153.693.686 | 3.246.955.864 |
| Maksimum | | 287.249.534 | 327.508.555 | 360.152.627 | 441.871.142 | 433.229.474 |
| Minimum | | 34.725.529 | 32.035.000 | 49.657.867 | 48.321.760 | 45.547.535 |
| Rata- rata | | 88.400.524 | 90.903.442 | 114.452.679 | 137.117.117 | 141.171.994 |

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2007 Kota Bandung memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, dengan jumlah Rp 287.249.534 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 34.725.529 dan untuk rata-rata perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 88.400.524. Pada tahun 2008 Kota Bandung memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dengan jumlah Rp 327.508.555 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 32.035.000 dan untuk rata-rata perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 90.903.442. Pada tahun 2009 Kota Bandung yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dengan jumlah Rp 360.152.627

sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak Rp 49.657.867 dan untuk rata-rata perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 114.452.679. Pada tahun 2010 Kota Bandung yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dengan jumlah Rp 441.871.142 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak Rp 48.321.760 dan untuk rata-rata perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 137.117.117. Dan pada tahun 2011 Kota Bandung yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dengan jumlah Rp 433.229.474 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak Rp 45.547.535 dan untuk rata-rata perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 141.171.994.

Gambar 4.2
Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
Periode 2007-2011



Sumber : Data Badan Pusat Satatistik yang diolah (2013)

4.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh variabel kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin besar kebutuhan wilayah otonomi suatu daerah dan semakin kecil potensi daerahnya maka akan semakin tinggi pula DAU yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

Berikut adalah data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011 :

Tabel 4.4
Dana Alokasi Umum
(Rupiah)

| No. | Nama Daerah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Kab. Bandung | 1.351.912.000 | 1.001.542.000 | 1.080.215.507 | 1.086.282.210 | 1.203.323.247 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 759.683.000 | 827.153.453 | 855.787.030 | 871.927.247 | 972.025.825 |
| 3 | Kab. Cianjur | 757.052.000 | 757.052.000 | 840.775.052 | 877.993.919 | 966.045.250 |
| 4 | Kab. Garut | 911.801.000 | 1.002.247.586 | 1.012.043.617 | 1.031.869.766 | 1.141.265.938 |
| 5 | Kab. Tasikmalaya | 718.561.000 | 789.565.000 | 801.713.443 | 921.384.109 | 881.979.959 |
| 6 | Kab. Ciamis | 775.730.000 | 857.303.370 | 858.175.531 | 867.400.725 | 953.515.826 |
| 7 | Kab. Kuningan | 550.002.396 | 586.883.970 | 664.974.237 | 660.391.147 | 722.473.887 |
| 8 | Kab. Cirebon | 730.885.992 | 793.934.226 | 856.714.078 | 867.300.289 | 930.584.969 |
| 9 | Kab. Majalengka | 555.540.000 | 600.795.440 | 642.722.208 | 717.458.879 | 782.567.369 |
| 10 | Kab. Sumedang | 551.711.000 | 608.993.530 | 629.006.913 | 634.169.767 | 731.141.647 |
| 11 | Kab. Indramayu | 610.890.996 | 682.130.000 | 706.774.342 | 782.462.654 | 862.083.501 |
| 12 | Kab. Subang | 560.645.000 | 618.600.000 | 666.926.184 | 712.690.907 | 746.157.310 |

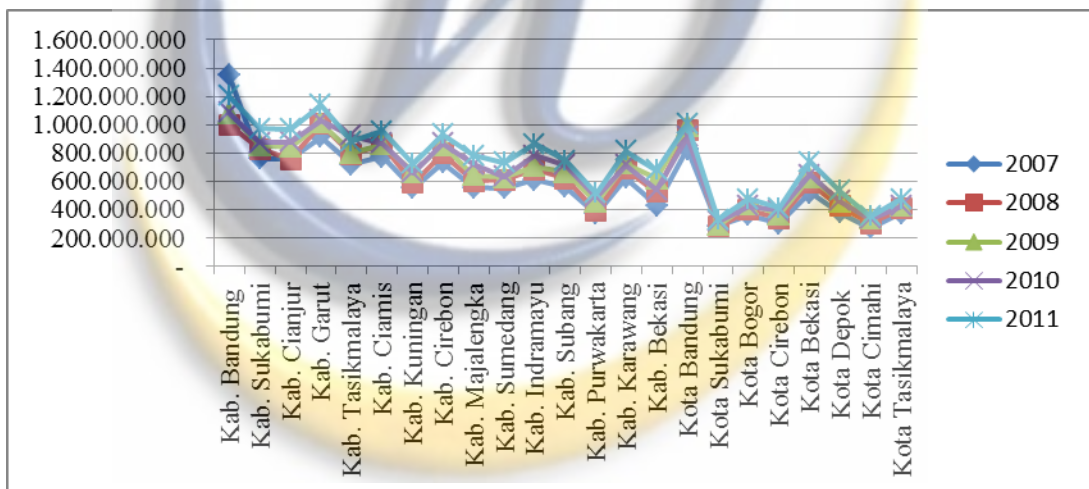
| | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13 | Kab. Purwakarta | 370.015.255 | 388.026.360 | 454.475.242 | 489.097.673 | 517.617.234 |
| 14 | Kab. Karawang | 622.602.000 | 689.521.000 | 722.098.972 | 714.360.098 | 814.982.255 |
| 15 | Kab. Bekasi | 430.417.000 | 525.365.000 | 618.237.958 | 536.786.256 | 680.732.734 |
| 16 | Kota Bandung | 828.204.700 | 959.016.430 | 989.233.620 | 912.571.834 | 1.005.982.541 |
| 17 | Kota Sukabumi | 285.095.000 | 278.944.000 | 287.525.695 | 314.420.182 | 330.918.367 |
| 18 | Kota Bogor | 359.576.514 | 397.367.000 | 439.246.348 | 426.093.607 | 473.156.910 |
| 19 | Kota Cirebon | 304.470.000 | 340.669.127 | 365.486.549 | 392.912.086 | 412.007.037 |
| 20 | Kota Bekasi | 522.199.000 | 590.144.000 | 630.392.977 | 647.082.121 | 737.162.222 |
| 21 | Kota Depok | 381.095.000 | 427.136.387 | 456.936.537 | 461.602.957 | 534.107.270 |
| 22 | Kota Cimahi | 270.849.000 | 305.008.920 | 339.000.335 | 333.439.320 | 354.972.241 |
| 23 | Kota Tasikmalaya | 373.869.708 | 406.141.000 | 431.419.690 | 426.764.264 | 476.087.274 |
| Total | | (13.582.807.561) | (14.433.539.799) | (15.349.882.065) | (15.686.462.017) | (17.230.890.813) |
| Maksimum | | 1.351.912.000 | 1.002.247.586 | 1.080.215.507 | 1.086.282.210 | 1.203.323.247 |
| Minimum | | 270.849.000 | 278.944.000 | 287.525.695 | 314.420.182 | 330.918.367 |
| Rata- rata | | 590.556.850 | 627.545.209 | 667.386.177 | 682.020.088 | 749.169.166 |

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bandung memperoleh paling besar dengan jumlah Rp 1.351.912.000 sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Cimahi sebesar Rp 270.849.000 dan untuk rata-rata perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 590.556.850. Pada tahun 2008 Kabupaten Garut memperoleh paling besar dengan jumlah Rp 1.002.247.586 sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp. 278.944.000 dan untuk rata-rata perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 627.545.209. Pada tahun 2009 Kabupaten Bandung memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar sebanyak Rp 1.080.215.507 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 287.525.695 dan untuk rata-rata perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun

2009 adalah sebesar Rp 667.386.177. Pada tahun 2010 Kabupaten Bandung memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar sebanyak Rp 1.086.282.210 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebanyak Rp 314.420.182 dan untuk rata-rata perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 682.020.088. Dan pada tahun 2011 Kabupaten Bandung memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar sebanyak Rp 1.203.323.247 sedangkan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebanyak Rp 330.918.367 dan untuk rata-rata perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 749.169.166.

Gambar 4.3
Kondisi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
Periode 2007-2011



Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)

4.1.5 Anggaran Belanja Modal

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Tetap yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode.

Berikut adalah data mengenai Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011

Tabel 4.5
Realisasi Anggaran Belanja Modal
(Rupiah)

| No. | Nama Daerah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Bandung | 427.996.241 | 198.387.000 | 148.925.370 | 198.090.778 | 277.432.358 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 188.217.807 | 160.345.464 | 148.648.941 | 258.510.712 | 165.359.431 |
| 3 | Kab. Cianjur | 202.536.735 | 211.806.743 | 162.007.786 | 224.832.749 | 230.328.795 |
| 4 | Kab. Garut | 218.555.522 | 256.264.913 | 75.464.674 | 155.205.401 | 273.496.338 |
| 5 | Kab. Tasikmalaya | 227.324.557 | 165.334.000 | 165.098.145 | 346.469.211 | 151.976.198 |
| 6 | Kab. Ciamis | 308.616.187 | 293.282.221 | 81.881.618 | 120.103.190 | 198.585.642 |
| 7 | Kab. Kuningan | 111.637.195 | 67.906.568 | 46.070.279 | 127.190.564 | 104.683.638 |
| 8 | Kab. Cirebon | 158.254.782 | 126.796.185 | 141.989.093 | 140.387.573 | 238.620.625 |
| 9 | Kab. Majalengka | 201.555.244 | 150.483.530 | 120.561.898 | 171.765.221 | 167.972.222 |
| 10 | Kab. Sumedang | 100.041.004 | 86.369.359 | 96.777.124 | 102.602.892 | 117.935.152 |
| 11 | Kab. Indramayu | 219.649.946 | 193.365.000 | 174.769.060 | 123.497.618 | 290.730.646 |
| 12 | Kab. Subang | 163.371.887 | 200.693.000 | 168.592.433 | 148.249.419 | 212.222.839 |
| 13 | Kab. Purwakarta | 78.309.820 | 72.184.790 | 103.648.704 | 126.161.699 | 209.795.165 |
| 14 | Kab. Karawang | 193.846.004 | 185.419.563 | 198.265.162 | 215.659.022 | 380.266.597 |
| 15 | Kab. Bekasi | 416.359.176 | 445.193.633 | 664.800.165 | 391.290.243 | 529.345.147 |
| 16 | Kota Bandung | 232.007.682 | 452.355.129 | 390.988.308 | 405.699.484 | 743.233.471 |
| 17 | Kota Sukabumi | 68.838.591 | 108.924.000 | 120.425.783 | 40.400.090 | 75.048.398 |
| 18 | Kota Bogor | 112.306.885 | 118.662.000 | 108.449.609 | 165.939.884 | 144.145.482 |

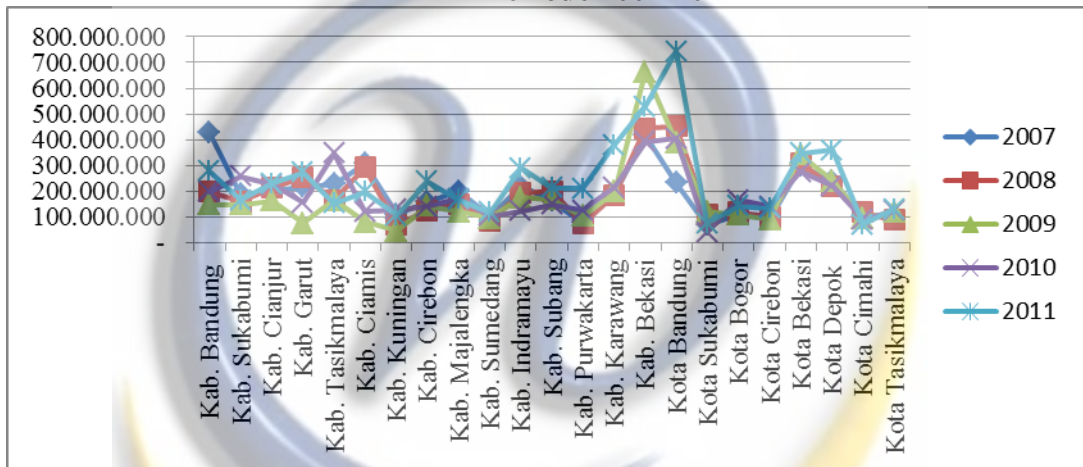
| | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 | Kota Cirebon | 89.749.744 | 99.626.459 | 92.022.318 | 140.365.711 | 132.136.682 |
| 20 | Kota Bekasi | 298.521.618 | 309.715.000 | 342.503.050 | 274.296.336 | 347.269.662 |
| 21 | Kota Depok | 239.390.385 | 218.721.753 | 239.253.505 | 219.717.982 | 360.285.424 |
| 22 | Kota Cimahi | 100.877.999 | 117.364.200 | 95.247.306 | 91.135.651 | 70.346.681 |
| 23 | Kota Tasikmalaya | 105.770.334 | 88.964.206 | 118.847.625 | 124.138.672 | 131.384.648 |
| Total | | 4.463.735.345 | 4.328.164.716 | 4.005.237.956 | 4.311.710.102 | 5.552.601.241 |
| Maksimum | | 427.996.241 | 452.355.129 | 664.800.165 | 405.699.484 | 743.233.471 |
| Minimum | | 68.838.591 | 67.906.568 | 46.070.279 | 40.400.090 | 70.346.681 |
| Rata- rata | | 194.075.450 | 188.181.075 | 174.140.781 | 187.465.657 | 241.417.445 |

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bandung memperoleh Anggaran Belanja Modal terbesar, dengan jumlah Rp 427.996.241 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kota Sukabumi sebesar Rp 68.838.591 dan untuk rata-rata perolehan Anggaran Belanja Modal pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 194.075.450. Pada tahun 2008 Kota Bandung memperoleh Anggaran Belanja Modal terbesar, dengan jumlah Rp 452.355.129 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Kuningan sebesar Rp 67.906.568 dan untuk rata-rata perolehan Anggaran Belanja Modal pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 188.181.075. Pada tahun 2009 Kabupaten Bekasi memperoleh Anggaran Belanja Modal terbesar dengan jumlah Rp 664.800.165 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Kuningan sebesar Rp 46.070.279 dan untuk rata-rata perolehan Anggaran Belanja Modal pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 174.140.781. Pada tahun 2010 Kota Bandung yang memperoleh Anggaran Belanja Modal terbesar dengan jumlah Rp 405.699.484 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kabupaten Sumedang sebesar Rp 40.400.090 dan untuk rata-rata perolehan Anggaran Belanja Modal pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 187.465.657. Dan pada tahun 2011 Kota Bandung yang memperoleh Anggaran Belanja Modal terbesar dengan jumlah Rp

743.233.471 sedangkan perolehan paling sedikit adalah Kota Cimahi sebesar Rp 70.346.681 dan untuk rata-rata perolehan Anggaran Belanja Modal pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 241.417.445.

Gambar 4.4
Kondisi Anggaran Belanja Modal
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
Periode 2007-2011



Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2012)

4.1.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Pengujian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

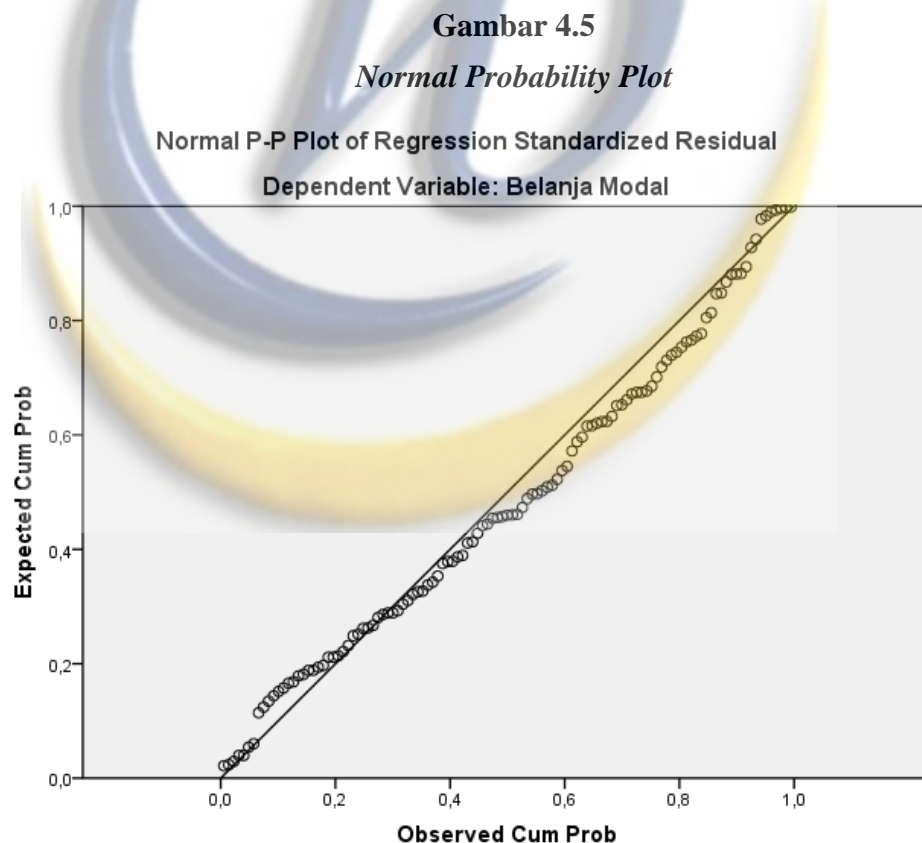
4.1.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, dimana data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada nilai

rata-rata dan median. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam penelitian ini.

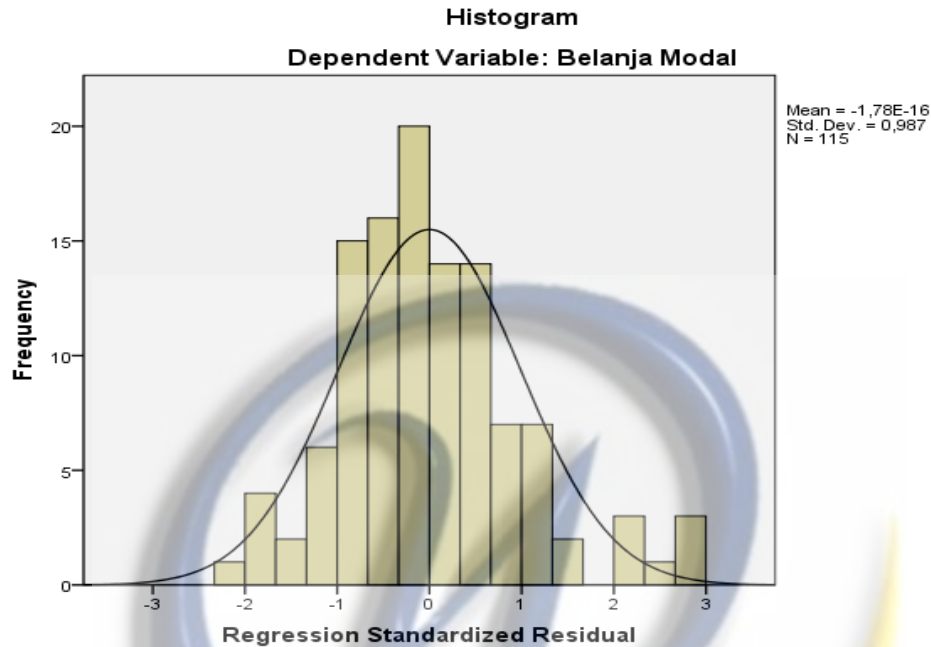
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan analisis grafik *normal probability plot* (Imam Gozali, 2001). Dengan plot ini, masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan pada distribusi normal. Normalitas terpenuhi apabila titik-titik (data) terkumpul di sekitar garis lurus. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Berikut uji hasil normalitas dengan menggunakan aplikasi *Software SPSS 19.0 for window*



Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Gambar 4.6
Histogram



Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan titik-titik yang menyebar disekitar garis lurus diagonal dan mengikuti arah garis tersebut atau berada disekitar dan sepanjang garis 45° , maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi uji normalitas.

4.1.6.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas. Cara untuk melihat apakah dalam sebuah penelitian terdapat multikolinieritas atau tidak salah satu caranya yaitu dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika $VIF > 10$, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya (Ghozali, 2005). Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF :

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| | (Constant) | 42522384,961 | 20258674,112 | | | | 2,099 | ,038 | | |
| Pertumbuhan Ekonomi | 2,963 | ,490 | ,545 | 6,045 | ,000 | ,794 | ,498 | ,330 | ,365 | 2,738 |
| Pendapatan Asli Daerah | ,399 | ,133 | ,266 | 2,996 | ,003 | ,730 | ,274 | ,163 | ,377 | 2,650 |
| Dana Alokasi Umum | ,057 | ,030 | ,113 | 1,936 | ,055 | ,382 | ,181 | ,106 | ,878 | 1,139 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Dari nilai VIF yang ada menunjukkan tidak adanya korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel bebas.

4.1.6.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji statistik Durbin Watson (DW).

Tabel 4.7
Autokorelasi Durbin-Watson

| Keterangan Autokorelasi Durbin Watson | Kesimpulan |
|--|----------------------------|
| 1,2837 sampai dengan 2,4334 | Tidak terjadi autokorelasi |
| $< 1,2837$ | Autokorelasi positif |
| $> 2,7163$ | Autokorelasi negative |
| 1,5666 sampai dengan 2,17163 | Tidak dapat disimpulkan |

Sumber: (Wulandari, Riadi, Hendripides, 2011)

Secara umum kriteria yang digunakan adalah (Ghozali,2006) :

1. Jika $d < d_l$, maka terdapat autokorelasi positif
2. Jika $d > (4-d_l)$, maka terdapat autokorelasi negatif
3. Jika $d_u < d < (4-d_u)$, maka tidak terdapat autokorelasi
4. Jika $d_l < d < d_u$ atau $(4-d_u)$, maka tidak dapat disimpulkan.

Nilai d_l dan d_u dapat dilihat pada table Durbin Watson, yaitu dengan melihat nilai α ; n ; $k-1$

Keterangan :

n = jumlah sampel

k = jumlah variable

α = taraf signifikan

Berikut adalah hasil uji autokolerasi menggunakan SPSS 19.0

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | Durbin-Watson | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | | Sig. F Change |
| 1 | ,819 ^a | ,670 | ,661 | 69944364,33272 | ,670 | 75,169 | 3 | 111 | ,000 | 1,860 |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

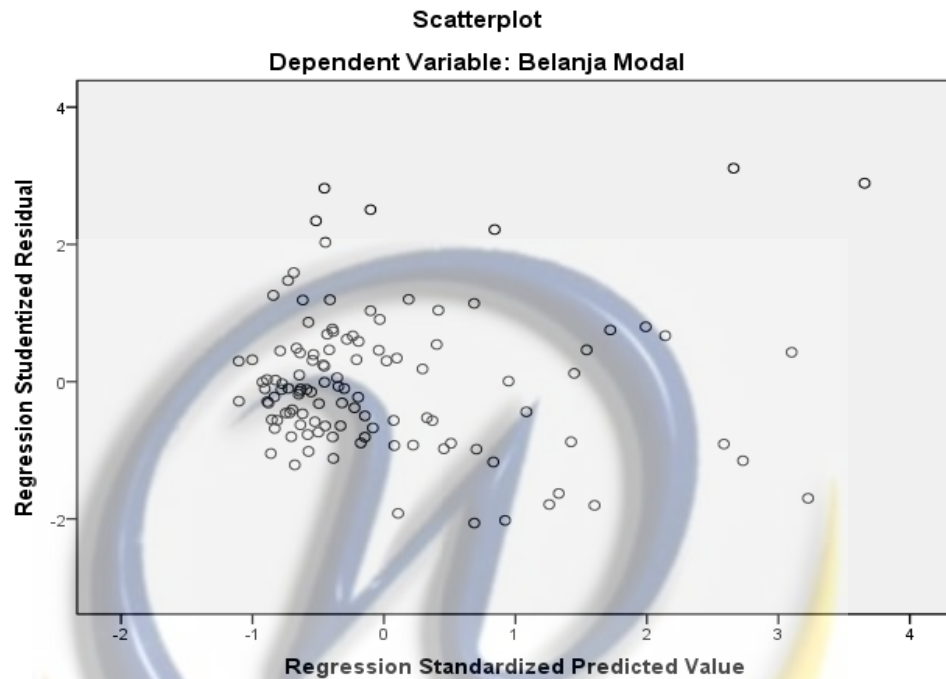
Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,860 berada diantara dU sampai dengan 4-dU. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing variabel bebas.

4.1.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat ada tidaknya heterokedasitas dalam sebuah penelitian salah satu caranya yaitu dengan menggunakan Grafik *Scatterplot* yaitu melalui diagram pencar antara nilai yang diprediksi (ZPRED) dan *studentized residual* (SRESID). Hasil dari uji heteroskedasitas dengan menggunakan Grafik *Scatter Plot* tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 4.7
Scatter Plot



Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Berdasarkan diagram pencar diatas, maka dapat dilihat bahwa penyebaran residual tidak homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian terbukti bahwa tidak terjadi gejala homoskedastis atau persamaan regresi memenuhi asumsi non-heteroskedastis.

4.1.7 Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Nilai taksiran variabel terikat

- X₁ = Kemampuan keuangan rasio PAD
- X₂ = Kemampuan Keuangan rasio BHPBP
- X₃ = Kemandirian Daerah
- b₀ = Konstanta
- b₁,b₂,b₃ = Koefisien Regresi

Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Koefisien Regresi Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| | (Constant) | 42522384,961 | 20258674,112 | | | | 2,099 | ,038 | | |
| Pertumbuhan Ekonomi | 2,963 | ,490 | ,545 | 6,045 | ,000 | ,794 | ,498 | ,330 | ,365 | 2,738 |
| Pendapatan Asli Daerah | ,399 | ,133 | ,266 | 2,996 | ,003 | ,730 | ,274 | ,163 | ,377 | 2,650 |
| Dana Alokasi Umum | ,057 | ,030 | ,113 | 1,936 | ,055 | ,382 | ,181 | ,106 | ,878 | 1,139 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Dari hasil output regresi tersebut diatas didapat persamaan regresi (dalam jutaan) sebagai berikut:

$$Y = 42522384,961 + 2,963X_1 + 0,399X_2 + 0,057X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, menjelaskan bahwa:

- a. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 2,963 artinya apabila terjadi perubahan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 2,963 atau 296,3%.
- b. Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,399 artinya apabila terjadi perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,399 atau 39,9%.
- c. Dana Alokasi Umum mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,057 artinya apabila terjadi perubahan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,057 atau 5,7%.

4.1.8 Pengujian Hipotesis

4.1.8.1 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Regresi dengan lebih dari dua variabel independen atau bebas digunakan Adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi. Hubungan korelasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.10
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | Sig. F Change | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | | |
| 1 | ,819 ^a | ,670 | ,661 | 69944364,33272 | ,670 | 75,169 | 3 | 111 | ,000 | 1,860 |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Nilai R pada intinya mengukur seberapa jauh seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,819 (81,9%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum mempunyai hubungan yang erat dengan variabel Belanja Modal. Dasar untuk mengatakan hubungan yang erat adalah apabila nilai R diatas 50 %.

Nilai *R-square* (R^2) atau koefisien determinasi model regresi diperoleh sebesar 0,670 menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Artinya bahwa variable Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mampu dijelaskan oleh variabel Belanja Modal sebesar 67% sedangkan sebesar 33% lainnya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

4.1.8.2 Uji Parsial (t-test)

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui keberartian hubungan atau pengaruh salah satu variabel bebas dengan tidak bebas dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji t dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing variabel. Jika nilai sig dibawah 0,05, maka masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| | (Constant) | 42522384,961 | 20258674,112 | | | | 2,099 | ,038 | | |
| Pertumbuhan Ekonomi | 2,963 | ,490 | ,545 | 6,045 | ,000 | ,794 | ,498 | ,330 | ,365 | 2,738 |
| Pendapatan Asli Daerah | ,399 | ,133 | ,266 | 2,996 | ,003 | ,730 | ,274 | ,163 | ,377 | 2,650 |
| Dana Alokasi Umum | ,057 | ,030 | ,113 | 1,936 | ,055 | ,382 | ,181 | ,106 | ,878 | 1,139 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut :

- 1) Pengujian pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Untuk menguji hipotesis ini kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

H_0 ditolak jika $sig. t < 0,05$

H_0 diterima jika $sig. t > 0,05$

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H_0 ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kab/Kota di Jawa Barat.

2) Pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H_0 ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kab/Kota di Jawa Barat.

3) Pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,055. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H_0 diterima dan kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kab/Kota di Jawa Barat.

4.1.8.3 Uji Simultan (*F-test*)

Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan *SPSS for Windows ver. 19*

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan
ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 1,103E18 | 3 | 3,677E17 | 75,169 | ,000 ^a |
| | Residual | 5,430E17 | 111 | 4,892E15 | | |
| | Total | 1,646E18 | 114 | | | |

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2012

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H_0 ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010 dilakukan pembahasan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal Secara Parsial

Pertumbuhan Ekonomi merupakan Indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu strategi kebijakan bidang ekonomi, demikian pula Rencana

Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Barat. Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita. Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama periode 2007-2011.

Berdasarkan hasil uji statistik-t tabel 4.11 diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara statistik berpengaruh positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kab/Kota di Jawa Barat dengan nilai signifikan 0,000 ($\alpha=5\%$). Dengan demikian H_a yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 23 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2007-2011 ini didominasi dari sektor retribusi, kemudian disusul dari sektor pajak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Bandung selama tahun 2007-2011. Pendapatan Asli Daerah terutama berasal dari pendapatan pajak daerah, lalu retribusi, lain-lain PAD, serta kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah-nya dari sektor pendapatan pajak daerah sebab melihat kondisi Kota Bandung sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah-daerah sekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk menggali pajak daerahnya terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat melakukan hal yang sama untuk menggali kemampuan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi geografis yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografi yang beragam, dan lain sebagainya.

Dari hasil analisis statistik-t tabel 4.11 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikansi 0,003 ($\alpha=5\%$). Demikian H_a yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007), Solikin (2007) maupun Putro (2011) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Melihat hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi Belanja Modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

Pada 23 Kab/Kota di Jawa Barat yang mendapatkan Dana Alokasi Umum tertinggi pada tahun 2007 adalah Kabupaten Bandung, tahun 2008 adalah Kabupaten Garut, tahun 2009 adalah Kabupaten Bandung, tahun 2010 adalah Kabupaten Bandung dan tahun 2011 adalah Kabupaten Bandung. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah

melebihi kemampuan fiskal sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebenarnya Pemerintah Daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung yang sebenarnya lebih meminimalisir Dana Alokasi Umum dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan Pendapatan Asli Daerah yang baik dari sektor pendapatan pajak daerah, retribusi maupun kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Apalagi melihat potensi dari Kabupaten Bandung yang kaya akan kekayaan alam serta letaknya yang strategis bagi perekonomian yang didukung dengan jumlah penduduk yang banyak dan luas yang cukup besar yang dari satu sisi dapat meningkatkan pendapatan dan disisi lainnya justru menambah kebutuhan daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik-t diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Dana Alokasi umum secara statistik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dengan demikian H_0 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal tidak dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya indikasi bahwa belanja modal sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum bersifat "**Block Grant**", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal Secara Simultan

Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan nilai signifikan 0,000. Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah meliputi bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011.

Analisis model regresi data yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas tersebut terhadap belanja modal Kabupaten/Kota. Berdasarkan analisis kuantitatif deskriptif yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dihasilkan kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, variabel PDRB memiliki t hitung sebesar 6,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai sig dibawah 0,05, sehingga variabel PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 2,963. Dan dari pengujian yang dilakukan juga diperoleh nilai F hitung sebesar 75,169 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, PDRB secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.
- 2) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, variabel PAD memiliki t hitung sebesar 2,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, dimana nilai sig dibawah 0,05, sehingga variabel PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,399. Dan dari pengujian yang dilakukan juga diperoleh nilai F hitung sebesar 75,169 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, PAD secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.
- 3) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, variabel DAU memiliki t hitung sebesar 1,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0,055, dimana nilai sig diatas 0,05, sehingga variabel DAU tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja

Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,057. Dan dari pengujian yang dilakukan juga diperoleh nilai F hitung sebesar 75,169 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, DAU secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sebagai berikut:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada objek lain yang lebih luas, tidak hanya di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.

2. Rekomendasi bagi pemerintah

Bagi pemerintah pusat sebaiknya dalam menyajikan RAPBN khususnya tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersamaan dengan penyusunan RAPBN, sehingga daerah akan lebih siap menaksir jumlah pengeluaran dan jumlah belanja dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta Kustadi. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. *The causal relationship between tax revenues and government spending in Malaysia*. Universiti Putra Malaysia, Working paper.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba 4: Jakarta.
- Blackley, P. 1986. Causality between revenues and expenditures of the size of Federal budget. *Public Finance quarterly*.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI).
- Ghozali, Imam. 2001. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia..

- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi.
- Holtz-Eakin, Whitney Newey, & Harvey Rosen. 1985. Implementing causality test with panel data, with an example from local public finance. *NBER Technical*.
- Iqbal Hasan. 2005. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif) Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Joulfaian, D. & R. Mookerjee. 1990. The interporal relationship between state and local government revenues and expenditure: Evidence from OECD countries.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The Political Economy of Public Expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Key, V.O. 1940. The lack of budgetary theory. *American Political Science Review* 34 (December), dalam Shafritz, Jay M. & Albert C. Hyde. 1997. *Classics of Public Administration*. Fourth edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.

- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working paper.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit PT Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Oates, Wallace E. 1995. Comment on "Conflict and Dilemmas of Desentralization" by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (DAU) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*. Second Edition, John Wiley & Sons, New York.

- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal*.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan keenam. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social*.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*.

Zain, Muhammad & Hermana, Suryo. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*.
PT Indeks: Jakarta.

Website :

[http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_Belanja_Daerah)

<http://infostatntb.wordpress.com/pengertian-pdrb-2/metode-perhitungan-pdrb/>

<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>

www.djpk.depkeu.go.id

